

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat ditentukan oleh perkembangan dalam sektor keuangannya. Hal ini karena pembangunan dalam sektor keuangan melibatkan rencana dan implementasi dari kebijakan untuk mengintensifkan tingkat moneterisasi perekonomian melalui peningkatan akses terhadap institusi keuangan, transparansi, dan efisiensi, serta mendorong *rate of return* yang rasional (Agrawal, 2001). Pembangunan sektor keuangan suatu negara sering dihadapkan pada kondisi sektor keuangan yang mengalami pendalaman (*financial deepening*) dan sektor keuangan yang mengalami pendangkalan (*shallow finance*) (Fry, 1995).

Sektor keuangan dalam perekonomian Indonesia juga menjelaskan adanya hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan besarnya stok modal. Semakin tinggi stok modal, semakin tinggi pula *output* perekonomian yang dapat dihasilkan. Sementara itu, besarnya akumulasi stok modal membutuhkan adanya mobilisasi tabungan melalui sektor keuangan yang mampu menyediakan sumber dana untuk peningkatan stok modal (investasi). Semakin besar tingkat tabungan, semakin besar peluang penyediaan dana untuk investasi yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Norman (2010), pendalaman sektor keuangan (*financial*

deepening) merupakan sebuah termin yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya peningkatan peranan, kegiatan dan jasa-jasa keuangan terhadap ekonomi. King dan Levine merancang 4 ukuran dalam perhitungan perkembangan sektor keuangan. Pertama, ukuran dari pendalaman sektor keuangan adalah rasio dari kewajiban lancar (*liquid liabilities*) dari sistem keuangan terhadap GDP. Kewajiban lancar dalam hal ini adalah (M3), namun apabila (M3) tidak bisa didapatkan maka digunakan (M2). Kedua, adalah rasio dari *deposit money bank domestic asset* dibagi dengan *deposit money bank domestic asset* ditambah dengan *central bank domestic asset* yang menggambarkan institusi keuangan yang lebih spesifik. Ketiga, rasio kredit dari sektor swasta non keuangan dibagi dengan total kredit domestik. Keempat, adalah rasio kredit sektor swasta non keuangan dibagi dengan GDP. Besar kecilnya jumlah uang beredar mencerminkan seberapa dalam (*financial deepening*) dan seberapa dangkal (*shallow financial*) sektor keuangan suatu negara. Indikator *financial deepening*, yaitu rasio M2 (*broad money*) terhadap PDB, sebagai ukuran kedalaman sektor keuangan suatu negara diharapkan dapat memberi potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Awal Juli 1997, Indonesia mengalami suatu goncangan ekonomi yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi menurun drastis, yaitu krisis moneter yang melanda ternyata sempat menghancurkan perekonomian Indonesia. Kondisi ini memicu pemerintah untuk mengambil langkah cepat demi menyelamatkan perekonomian negara. Pemerintah dituntut melakukan berbagai reformasi, khususnya di bidang ekonomi yang memungkinkan

terjadinya perubahan kerangka hukum dan kelembagaan untuk menjalankan kebijakan moneter dan untuk mengamankan sistem keuangan Indonesia (Julaihah, 2005).

Berkembangnya sektor keuangan pasca deregulasi 1988 yang mengarah kepada pemberian peluang ekspansi berupa pendirian bank baru, cabang-cabang dan kantor kas baru dengan tujuan agar bank dapat menghimpun dana yang lebih besar dari masyarakat, paket kebijakan Desember 1988 dan paket kebijakan Maret 1989 semua diarahkan pada perbaikan kebijakan efisiensi sektor keuangan dan pengembangan pasar modal melalui pembukaan hambatan arus modal masuk. Indonesia sebagai negara yang berkembang juga mempunyai tujuan seperti negara lain, yaitu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adanya reformasi yang dilakukan di sektor keuangan dan perbankan telah menumbuhkan dan berkembangnya inovasi produk-produk keuangan baru.

Indonesia sebagai negara berkembang, apabila ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus melakukan pendalaman keuangan atau *financial deepening*. Pembuat kebijakan seperti otoritas moneter dan otoritas jasa keuangan harus memantau setiap indikator yang digunakan untuk mengukur kedalaman keuangan. Khususnya indikator nilai kredit yang diberikan perbankan kepada masyarakat, apabila kredit konsumsi yang diberikan berlebihan akan mengganggu kesehatan perbankan seperti *credit event* yang selanjutnya akan membahayakan makro ekonomi negara.

Informasi jumlah uang beredar (M2) dengan produk domestik bruto (PDB)

pada periode 2000-2014 dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui perkembangan *financial deepening* di Indonesia. Berikut akan disajikan perkembangan *financial deepening* di Indonesia, yang menggunakan jumlah uang beredar (M2) dengan produk domestik bruto (PDB).

Tabel 1.1
Persentase *Financial Deepening* di Indonesia periode 2000-2014

No	Tahun	M2 (Miliar Rupiah)	PDB (Miliar Rupiah)	M2/PDB (%)
1	2000	747.028	1.389.769,9	53,8
2	2001	844.053	1.440.405,7	58,6
3	2002	883.908	1.505.216,4	58,7
4	2003	955.692	1.577.171,3	60,6
5	2004	1.033.527	1.656.516,8	62,4
6	2005	1.203.215	1.750.815,2	68,7
7	2006	1.382.074	1.847.126,7	74,8
8	2007	1.643.203	1.963.091,8	83,7
9	2008	1.895.839	2.082.103,7	91,1
10	2009	2.141.383,70	2.178.851	98,3
11	2010	2.471.205,79	2.314.458,8	106,8
12	2011	2.877.219,57	2.464.677	116,7
13	2012	3.307.507,55	2.618.938	126,3
14	2013	3.730.409,35	2.770.345	134,7
15	2014	4.173.326,50	2.910.927	143,4

Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

Tabel 1.1 di atas, menunjukkan pertumbuhan ekonomi setelah mengalami krisis moneter dan dilakukannya berbagai upaya perbaikan ekonomi nasional melalui beberapa kebijakan keuangan. Terlihat pada perkembangan JUB (M2) di Indonesia mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, seperti kebutuhan dari sisi moneter dan kegiatan ekonomi. Jumlah uang beredar dalam suatu periode merupakan hasil perilaku dari otoritas moneter, bank-bank umum, dan masyarakat secara bersama-sama (Iswardono, 1991).

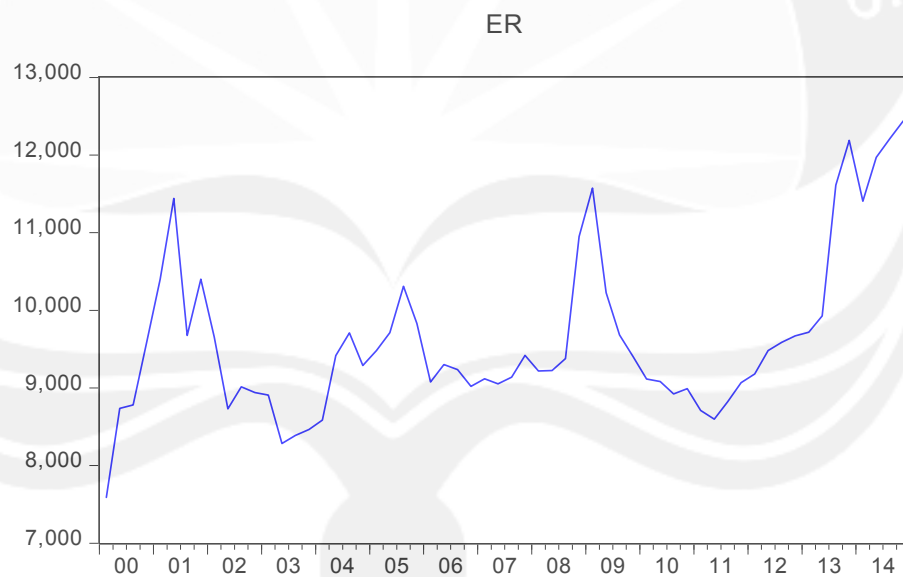
Pertumbuhan PDB setelah krisis terlihat mengalami peningkatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 sehingga perkembangan PDB dari tahun ke tahun memiliki *trend* yang positif. Peningkatan tersebut ditunjang oleh berhasilnya restrukturisasi perbankan dan hutang pada tahun 1999, peningkatan ekspor non-migas, serta ekspansi kredit yang dikucurkan untuk membangun perekonomian semenjak tahun 2002.

Perkembangan *Financial deepening* yang diukur dari jumlah uang beredar dalam artian luas (M2) dengan produk domestik bruto (PDB) meningkat cukup pesat sejak deregulasi keuangan dikeluarkan, seperti terlihat pada tabel di atas. Semakin tinggi rasio M2/PDB mempunyai arti bahwa penggunaan uang dalam perekonomian suatu negara semakin dalam. Semakin tinggi pendalaman keuangan semakin besar penggunaan uang dalam perekonomian dan semakin besar serta semakin meluas kegiatan lembaga keuangan maupun pasar uang.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2010), memperdalam pasar keuangan juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk menarik akses likuiditas di perekonomian dan memperkecil risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang berasal dari gejolak nilai tukar maupun fluktuasi di pasar saham atau obligasi. Pasar keuangan yang dalam mempunyai beberapa efek positif, yaitu: (1) Dari sisi dunia usaha, pasar keuangan yang dalam diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi dengan tersedianya berbagai alternatif pembiayaan. (2) Dari sisi investor, pasar keuangan harus memberikan beragam pilihan instrumen investasi sehingga

mereka dapat mengoptimalkan imbal hasil dari investasinya. (3) Dapat mendorong lebih banyak investor untuk menanamkan dananya di pasar keuangan sehingga dapat berdampak positif terhadap pembiayaan ekonomi.

Perkembangan *financial deepening* di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan efisiensi dari kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Variabel yang dianalisis, yaitu pertama variabel kurs nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika sebagai instrumen sebuah perekonomian yang telah melakukan perdagangan internasional dengan menggunakan nilai tukar tersebut.



Gambar 1.1

Perkembangan Kurs Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap USD

Tahun 2000 – 2014

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia

Data diolah dari tahun 2000.Q1–2014.Q4

Kurs rupiah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang cenderung melemah terhadap dollar Amerika. Salah satu penyebabnya dapat diketahui dengan terjadinya krisis keuangan Indonesia tahun 1997 hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum teratasi secara baik. Peran serta pemerintah tidak dapat dipungkiri lagi dalam mengatur kestabilan keuangan Indonesia melalui instrumen nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

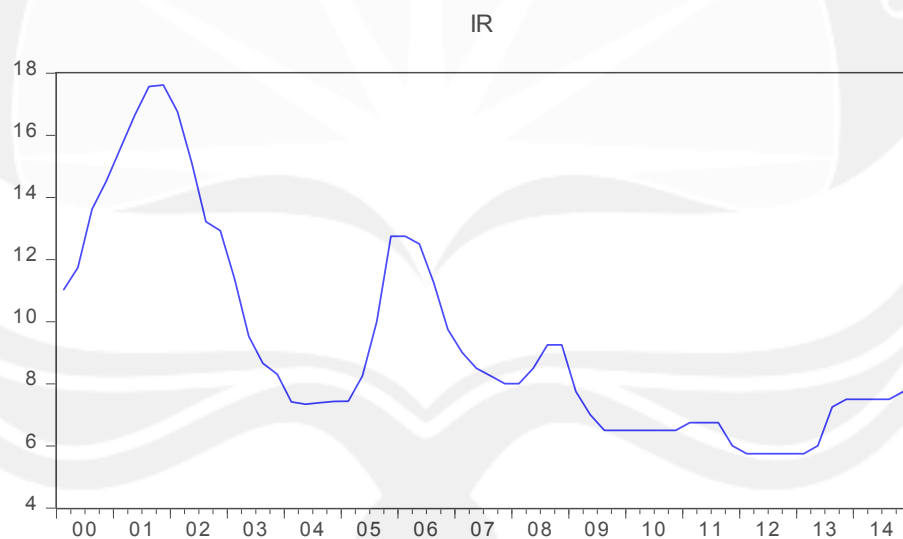
Gejolak kurs kembali terjadi pada 2001, kurs kembali terdepresiasi sebesar Rp.11.440/USD. Tekanan depresiasi rupiah terutama disebabkan oleh kesenjangan antara penawaran dan permintaan valuta asing (*supply-demand imbalance*), akses likuiditas rupiah di pasar uang, serta sentiment negatif terhadap ketidakstabilan situasi politik dan keamanan dalam negeri. Perkembangan itu membuat nilai tukar rupiah mengalami deviasi yang cukup besar terhadap nilai fundamentalnya. Kurs terapresiasi kembali pada tahun 2002-2003 sebesar Rp.8.465/USD, tetapi terlihat lagi pada tahun 2004 dan 2005 mengalami depresiasi mencapai Rp.10.310/USD akibat dari kenaikan harga BBM. Pada tahun 2006-2007 kembali stabil sebesar Rp. 9.419/USD, disebabkan oleh membaiknya fundamental makroekonomi nasional yang bersumber pada meningkatnya surplus neraca pembayaran hasil ekspor non migas dan laju lintas modal portofolio. Pada kuartal ke empat tahun 2008 sampai dengan kuartal kedua tahun 2009, kurs kembali terdepresiasi sebesar Rp.10.225/USD, hal tersebut terjadi karena pada akhir tahun 2008 Indonesia terkena imbas krisis *financial* global. Krisis tersebut membuat selisish resiko

(*risk spread*) dari surat-surat berharga Indonesia mengalami peningkatan yang mendorong arus modal keluar dari investasi asing pada pasar modal serta defisit neraca pembayaran Indonesia yang terus menekan rupiah. Pada tahun 2010-2011 kembali stabil, setelah stabil kembali terdepresiasi pada tahun 2012-2014 mencapai Rp.12.440/USD.

Variabel yang kedua adalah tingkat suku bunga sebagai sasaran operasional yang digunakan dari bank sentral dan instrumen yang secara terpusat memiliki kekuatan sebagai *opportunity cost* dari memegang uang. Di Indonesia, bank memiliki peranan penting dalam menggerakkan sektor perekonomian dengan cara memberikan kredit agar sektor riil berkembang. Pada umumnya bank berperan sebagai intermediasi (*intermediary role*) dan lembaga transmisi (*transmission role*) dalam perekonomian. Semenjak Indonesia memberlakukan deregulasi keuangan sejak Juni 1983 yang intinya menghapuskan pagu suku bunga baik deposito maupun kredit, ternyata hal ini membawa pengaruh mendasar terhadap perkembangan sistem perbankan yang selanjutnya mendorong proses peningkatan pendalaman keuangan. Para pelaku bisnis dan juga pakar ekonomi menuntut Bank Indonesia selaku penguasa moneter untuk mempengaruhi suku bunga deposito dan juga suku bunga kredit berkaitan dengan turunnya suku bunga acuan, agar dapat meningkatkan pengembangan sektor riil melalui kegiatan investasinya.

Penentuan tingkat suku bunga yang wajar memerlukan langkah-langkah cermat, karena tingkat suku bunga yang terlalu tinggi maupun yang terlalu rendah dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian dalam negeri.

Tingkat suku bunga yang terlalu rendah disisi lain dapat mendorong investasi, namun di lain pihak tidak mendorong mobilisasi dana melalui perbankan sehingga menimbulkan kesenjangan antara tabungan dan investasi. Namun demikian, tingkat bunga yang tinggi tidak mendorong kegiatan investasi dan produksi. Pada keadaan *tight money policy*, tingkat suku bunga terlalu tinggi dapat mengakibatkan kredit macet. Pada saat pengusaha membutuhkan dana untuk investasi, seharusnya diimbangi dengan penawaran uang yang cukup. Akibat hal tersebut, banyak orang mengambil dana yang ada tersebut walaupun sangat mahal. Dengan demikian keadaan ini menyebabkan bertumpuknya kredit macet, sebab aliran dana makin ketat.



Gambar 1.2

Perkembangan Suku Bunga SBI 31 Hari

Tahun 2000–2014 (dalam satuan persen)

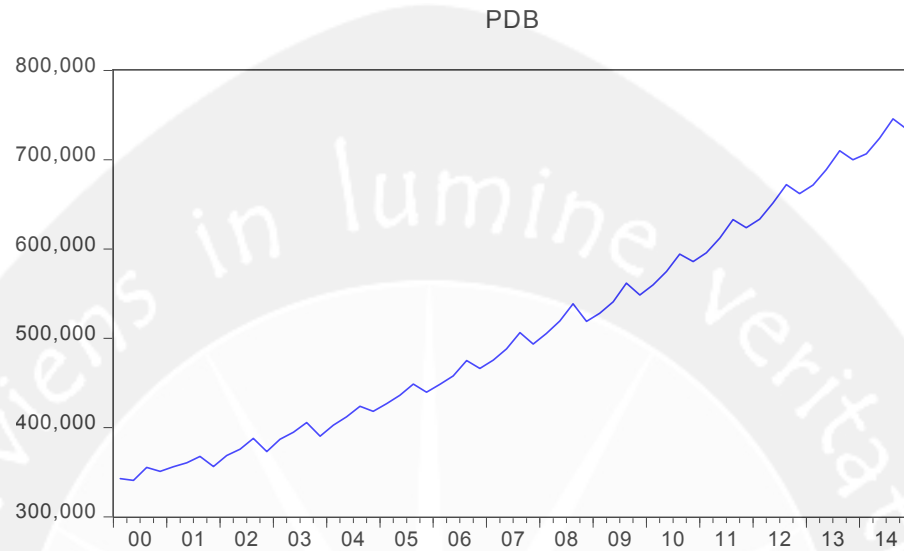
Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia

Data diolah dari tahun 2000.Q1–2014.Q4

Tingkat suku bunga kembali mengalami gejolak peningkatan dari 11,03% pada tahun 2000 menjadi 17,62% di tahun 2001. Peningkatan tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian uang primer selama tahun 2001 yang masih bertumpu pada operasi pasar terbuka (OPT) melalui lelang SBI. Kebijakan OPT tersebut dimaksudkan untuk menyerap kelebihan likuiditas perbankan sebagaimana tercermin pada relatif kecilnya *excess reserve* perbankan. Perkembangan tingkat suku bunga selanjutnya pada tahun 2002–2005, tingkat suku bunga mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut berkaitan dengan mulai membaik roda perekonomian nasional, ditandai dengan meningkatnya sisi permintaan dan ekspansi kredit. Tahun 2006 tingkat suku bunga kembali mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipicu oleh tingginya inflasi nasional sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Gejolak suku bunga terjadi pada tahun 2008, peningkatan suku bunga di tahun 2008 lebih dikarenakan oleh faktor eksternal, sebagai imbas krisis finansial global. Suku bunga naik menjadi 9,25% dari periode sebelumnya, dengan tujuan untuk memberikan sentimen yang positif di pasar keuangan. Pada saat itu arus modal keluar dari investasi asing sangat besar, oleh karena itu otoritas moneter mencoba untuk mengatasinya dengan meningkatkan suku bunga tersebut. Pada tahun 2009-2014 suku bunga mengalami penurunan dari tahun ketahun, sehingga membuat alternatif masyarakat untuk berinvestasi.

Variabel yang ketiga adalah pendapatan nasional yang diproksi

dengan PDB salah satu indikator yang digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara.



Gambar 1.3

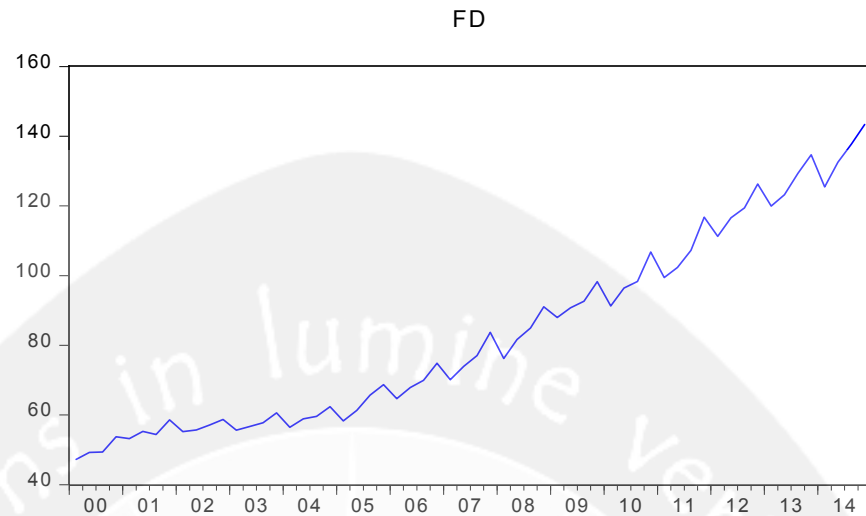
Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia

Tahun 2000–2014 (dalam satuan miliar Rupiah)

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS–Indonesia (Data diolah dari tahun 2000.Q1–2014.Q4)

Perkembangan pendapatan nasional dimana yang diproksi dengan produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2000–2014 dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan Gambar (1.3) di atas. PDB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan PDB terlihat memiliki *trend* yang positif. Peningkatan PDB ditunjang oleh berhasilnya restrukturisasi perbankan dan utang pada tahun 1999, peningkatan ekspor non migas, serta ekspansi kredit yang dikucurkan untuk membangun perekonomian semenjak tahun 2002.

Tujuan utama *financial deepening* adalah meningkatkan rasio tabungan domestik terhadap pendapatan, untuk meningkatkan (memperdalam) ukuran sistem moneter untuk menghasilkan peluang keuntungan bagi investor serta memperkuat proses mobilisasi dan alokasi tabungan, hal ini memungkinkan alokasi yang lebih baik dari tabungan dengan memperluas dan mendiversifikasi pasar keuangan dan pasar modal yang peluang investasi bersaing untuk aliran tabungan. *Financial deepening* digunakan dalam literatur ekonomi berarti peningkatan stok aset keuangan relatif terhadap produk domestik bruto (PDB) (Falegan, 1987). Saat itu diperkenalkan oleh Shaw (1973) dan Mackinnon (1973), sebagai pengukuran alokasi yang efisien modal dengan menggeser lebih dari sumber daya yang tersedia untuk peluang investasi yang lebih baik. *Financial deepening* merupakan hasil dari penerapan kebijakan keuangan yang tepat nyata, yaitu dengan berhubungan tingkat pengembalian *riil* untuk saham *riil* keuangan. Sebaliknya, sistem keuangan dangkal sebagian konsekuensi dari distorsi dalam harga keuangan.



Gambar 1.4

Perkembangan *Financial Deepening* Indonesia

Tahun 2000–2014 (dalam satuan persen)

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS–Indonesia (Data diolah dari tahun 2000.Q1–2014.Q4)

Berdasarkan Gambar (1.4) di atas, *financial deepening* mengalami peningkatan. Penggunaan rasio M2/PDB sebagai indikator *financial deepening* juga dibenarkan oleh King dan Levine (1993), semakin kecil rasio M2/PDB semakin dangkal sektor keuangan suatu negara. Suatu negara dikatakan memiliki sektor keuangan yang dalam apabila rasio $M2/PDB > 20\%$ dan dikatakan sektor keuangan yang dangkal apabila $M2/PDB < 20\%$ (Azeinmen dan Chricton, 2006). Penggunaan rasio ini merupakan rasio penggunaan M2 untuk menghasilkan setiap PDB. Indikator *financial deepening* (M2/PDB) mengukur peranan sistem keuangan dalam memobilisasi tabungan. Dede Ruslan (2011), menyatakan Indonesia yang merupakan negara sedang berkembang

memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan negara sedang berkembang lainnya. Tujuan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan dihadapkan pada permasalahan dalam keterbatasan modal untuk membiayai investasi pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan secara mandiri dan tidak tergantung dari bantuan luar negeri.

Penelitian oleh King dan Levine (1993) terhadap 80 negara selama tahun 1960-1989 melihat hubungan kausalitas antara *financial deepening* dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam penelitiannya tersebut King dan Levine menjabarkan *financial deepening* menjadi empat variabel, yaitu rasio antara jumlah uang beredar (M2) terhadap PDB, alokasi kredit domestik oleh bank sentral, persentase kredit yang dialokasikan terhadap sektor swasta, dan rasio kredit sektor swasta terhadap PDB. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dilihat dari perubahan dalam PDB perkapita. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan *financial deepening*.

Penelitian safdar (2012), meneliti hubungan antara *financial deepening* dan pertumbuhan ekonomi di Kenya, dengan menggunakan analisis deskriptif *survey* penelitian menunjukkan bahwa *mobile banking*, lembaga perbankan dan refrensi kredit adalah indikator dari *financial deepening*. Berdasarkan hasil penelitian norman (2010), menyatakan bahwa *financial deepening* pada sektor pasar modal dan perbankan

berpengaruh positif terhadap *Gross Domestic Bruto* (pertumbuhan ekonomi) di Indonesia. Sedangkan Graff (2001), dalam penelitiannya membagi hubungan kausalitas antara perkembangan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi empat, yaitu perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi tidak saling terkait, perkembangan ekonomi menyebabkan perkembangan sektor keuangan, sektor keuangan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi serta perkembangan sektor keuangan, dalam jangka pendek justru menghambat perkembangan sektor *riil*. Pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengembangkan pasar keuangan suatu negara.

Agrawal (2001), meneliti pengaruh suku bunga, nilai tukar, dan PDB terhadap *financial deepening* di negara Asia, seperti; Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Thailand. Dalam pengamatannya selama pertengahan tahun tahun 1990an Agrawal menggunakan rasio antara jumlah uang beredar (M2) dengan PDB sebagai variabel *financial deepening* di empat negara tersebut. Hasil dari penelitiannya dengan menggunakan *Error Correction Model* dan uji Kointegrasi, menunjukkan bahwa rasio dalam *financial deepening* umumnya meningkat seiring dengan peningkatan dalam suku bunga dan dengan terjadinya depresiasi mata uang domestik terhadap US\$. Suku bunga yang tinggi tersebut menyebabkan masuknya asset luar negeri ke dalam sistem perbankan masing-masing negara. Kenaikan dalam suku bunga tersebut juga berdampak pada kenaikan

dalam rasio investasi dalam perekonomian, sehingga dalam implikasi kebijakan, Agrawal menyarankan adanya liberalisasi dalam suku bunga dalam negara-negara tersebut, meskipun harus dilakukan secara bertahap dan dengan kontrol yang baik guna meminimalkan potensi risiko finansial yang terjadi.

Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi *financial deepening* (Dede Ruslan, 2011) diantaranya:

1. Pengaruh nilai tukar mata uang terhadap *financial deepening*

Naik turunnya nilai tukar mata uang pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor sesuai dengan sistem yang dianutnya. Sistem nilai tukar tetap, berarti nilai kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing besar kecilnya ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Sistem nilai tukar mengambang, maka nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh faktor–faktor seperti jumlah uang beredar, inflasi, tingkat bunga dan pendapatan (Mudrajat Kuncoro, 1996:157). Baik dalam sistem nilai tukar tetap maupun dalam sistem nilai tukar mengambang fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak pada perekonomian. Suatu apresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing dapat menyebabkan semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa. Bila terjadi keadaan *over demand*, maka hal tersebut dapat mengakibatkan inflasi yang tinggi. Sedangkan apabila mata uang domestik mengalami depresiasi terhadap mata uang asing, maka hal tersebut dapat mengakibatkan masyarakat akan terus memburu

mata uang asing. Kondisi ini dikarenakan masyarakat akan menyimpan sebagian kekayaan dalam bentuk mata uang asing. Sehingga secara umum deperesiasi nilai tukar mata uang akan berdampak negatif terhadap *financial deepening*.

2. Pengaruh tingkat bunga terhadap *financial deepening*

Berkaitan dengan peranan tingkat bunga terhadap pendalaman keuangan (*financial deepening*), McKinnon dan Shaw 1973 menguraikan suatu teori yang dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan di sektor keuangan di negara sedang berkembang pada tahun 1980an. Pandangan McKinnon dan Shaw mengenai peranan suku bunga sangat terkait dengan adanya kebijakan represi keuangan (*financial repression*) yang terjadi dalam perekonomian suatu negara. Menurutnya represi keuangan yang salah satunya adalah ditandai oleh adanya pembatasan dalam tingkat bunga (suku bunga *riil* rendah) dalam perekonomian, justru dapat menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank dan pada akhirnya *suplay* dana investasi akan berkurang.

3. Pengaruh pendapatan nasional terhadap *financial deepening*

Dalam pengertian ekonomi mikro pendapatan merupakan insentif yang diperoleh masyarakat dari kegiatan usahanya. Semakin tinggi pendapatan menunjukkan semakin besarnya insentif yang diterima masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Pendapatan yang tinggi pada akhirnya berdampak pada semakin tinggi pula permintaan terhadap

barang dan jasa dalam perekonomian.

Dalam konteks makro ekonomi pendapatan diartikan sebagai keseluruhan barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara pada suatu periode waktu tertentu. Pendapatan yang tinggi menandakan bahwa output yang dihasilkan oleh perekonomian menjadi meningkat. Secara umum semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin meningkatkan *financial deepening*.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti kondisi *financial deepening* di Indonesia apakah menunjukkan kedalaman atau malah sebaliknya, dengan menganalisis dari segi kurs nilai tukar, tingkat suku bunga, dan pendapatan nasional di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh variabel kurs nilai tukar, tingkat suku bunga SBI, dan pendapatan nasional terhadap variabel *financial deepening* di Indonesia dari tahun 2000–2014 baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel kurs nilai tukar, tingkat suku bunga SBI, dan pendapatan nasional, terhadap variabel *financial deepening* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Secara teoritis, demi kepentingan akademis diharapkan bisa dijadikan tambahan wacana penelitian dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama yang berkaitan dengan faktor-faktor makro ekonomi yang berpengaruh terhadap *financial deepening*.
2. Secara praktis, diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan dengan penelitian ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana perkembangan pendalaman keuangan yang terjadi di Indonesia dan dapat diterima penulis sebagai proses pembelajaran, khususnya dalam bidang manajemen keuangan.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk menjaga agar tujuan akhir dari penelitian ini tetap pada fokus utamanya, maka dibawah ini dijelaskan beberapa batasan mengenai variabel-variabel yang diamati agar masalah yang diteliti cakupannya tidak terlalu luas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menganalisis kurs nilai tukar, tingkat suku bunga SBI, dan pendapatan nasional yang diproksi dengan produk domestik bruto (PDB).
2. Data yang digunakan kurs nilai tukar diambil berdasarkan kurs tengah rupiah terhadap dollar AS, untuk suku bunga dari SBI 1 bulan, dan PDB menurut harga konstan berdasarkan metode produksi. *Financial deepening* yang diteliti merupakan hasil dari pembagian jumlah uang beredar (JUB) dan PDB.
3. Semua data merupakan data kuartal dengan rentang waktu Januari 2000 sampai dengan Desember 2014.
4. Negara yang menjadi obyek penelitian adalah Indonesia.
5. Menggunakan metode *Error Correction Model* Engle-Granger.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

- a. Menggunakan data *time series* dari tahun 2000-2014
- b. Penelitian ini menggunakan jumlah uang beredar dengan PDB sebagai ukuran *financial deepening*
- c. Penelitian ini menggunakan metode model koreksi kesalahan (ECM) Engle-Granger.
- d. Menambahkan uji kausalitas Granger untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang hal-hal yang menyangkut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Manfaat penelitian, batasan penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang berisi jabaran teori-teori dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis hasil penelitian. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah skema yang dibuat untuk menjelaskan secara singkat permasalahan yang

akan diteliti. Hipotesis adalah pernyataan yang disimpulkan dari tinjauan pustaka, serta jawaban sementara atas masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang data, definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan metode analisis data yang akan digunakan untuk memberikan gambaran bagi penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran data penelitian, statistik deskriptif serta hasil penelitian (analisis data) dan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian, dengan menggunakan alat analisis yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan dan juga berisi saran-saran yang direkomendasikan untuk riset selanjutnya.